

**RELEVANSI NILAI PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA INDONESIA**

Azizah Nur Fitriani¹, Paxxia Nafisah², Putri Nurkhilafah³, Zaenul Slam⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: azizahnurf27@gmail.com¹, paxxiianaafisah@gmail.com², lkhalifah828@gmail.com³,
zaenul_slam@uinjkt.ac.id⁴

Abstrak: Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia lahir melalui proses panjang perjalanan sejarah dan perjuangan nasional. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tumbuh dari semangat perjuangan kemerdekaan, berperan penting dalam pembentukan identitas nasional, serta tetap relevan di tengah tantangan modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan pluralitas sosial. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis sosial-politik kontemporer, penelitian ini menegaskan bahwa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial masih menjadi fondasi moral yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut menghadapi berbagai hambatan, di antaranya lemahnya internalisasi di kalangan masyarakat serta meningkatnya pengaruh budaya individualistik dan materialistik yang menggerus semangat gotong royong dan toleransi. Karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus digalakkan melalui pendidikan karakter, keteladanan moral pemimpin, serta pemanfaatan teknologi digital secara positif. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga strategi penting untuk membangun masa depan bangsa yang berkeadilan, beradab, dan berkepribadian di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Sejarah, Relevansi, Pancasila, Perjuangan.

***Abstract:** The values of Pancasila as the foundation of Indonesia's ideology and national outlook were born through a long historical process and the struggle for independence. This article discusses how the values of Pancasila emerged from the spirit of the independence movement, played a crucial role in shaping national identity, and remain relevant amid modern challenges such as globalization, technological development, and social pluralism. Based on findings from recent literature and contemporary socio-political analysis, this study affirms that the values of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice continue to serve as a strong moral foundation for national and state life. However, the implementation of these values faces various obstacles, including weak internalization among citizens and the growing influence of individualistic and materialistic cultures that undermine the spirit of mutual cooperation and tolerance. Therefore, revitalizing Pancasila's values must be continuously promoted through character education, moral leadership, and the positive use of digital technology. Thus, strengthening the values of Pancasila is not only a form of respect for the*

nation's historical struggle but also an essential strategy to build a just, civilized, and strong-minded nation in the midst of changing times.

Keywords: History, Relevance, Pancasila, Struggle.

PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia merupakan kisah panjang yang sarat dengan perjuangan, pengorbanan, serta pencarian jati diri nasional. Namun, muncul permasalahan mendasar mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap dapat diaktualisasikan di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks. Banyak generasi muda kini mengenal Pancasila hanya sebatas hafalan tanpa memahami makna filosofis dan moral di baliknya (Sofyan & Sanusi, 2023). Arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan kuatnya budaya luar menyebabkan pergeseran nilai sosialmenurunnya semangat gotong royong, toleransi, serta kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Fenomena individualisme, materialisme, dan pragmatisme kini kian tampak dalam kehidupan sosial masyarakat modern (Widodo & Nugraha, 2025). Hal ini menegaskan perlunya revitalisasi nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa.

Pancasila bukanlah hasil pemikiran yang muncul secara tiba-tiba, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual masyarakat Nusantara yang telah hidup jauh sebelum kemerdekaan (Awaluddin, 2024). Lima sila dalam Pancasila menggambarkan keseimbangan antara aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang bersifat universal dan relevan dengan perkembangan zaman (Kolek et al., 2025).

Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga pandangan hidup (way of life) dan ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. Sejak masa awal kemerdekaan, Pancasila telah menjadi landasan pokok dalam setiap fase kehidupan bangsa. Pada masa awal berdirinya negara, Pancasila menjadi semangat perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan dan membangun identitas nasional. Dalam masa pembangunan nasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan sosial, politik, dan ekonomi (Rusmulyani, 2024). Kini, di era modern dan serba digital, Pancasila dihadirkan kembali dengan semangat baru sebagai pedoman moral dan ideologis yang menuntun bangsa menghadapi tantangan globalisasi, krisis etika, dan disintegrasi sosial (Arifin et al., 2024).

Jurnal Inovasi Pembelajaran Progresif

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jipp>

Vol. 6, No. 4, Desember 2025

Namun, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi menimbulkan tantangan baru. Perubahan sosial yang cepat, media digital, serta konflik sosial dan politik menjadi ujian nyata bagi implementasi nilai-nilai Pancasila (Firmansyah et al., 2025). Nilai-nilai dasar Pancasila sejatinya bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna filosofisnya. Misalnya, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab kini dapat diterapkan dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan hidup (Suryohadiprojo, 2023). Sementara sila Persatuan Indonesia menjadi dasar untuk memperkuat integrasi nasional di tengah polarisasi politik dan maraknya ujaran kebencian di media sosial (Haryatmoko, 2024).

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga sangat relevan di era demokrasi modern. Demokrasi yang sehat tidak hanya menekankan pada proses elektoral, tetapi juga pada etika politik, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat (Wicaksana, 2024). Oleh sebab itu, pendidikan politik berbasis Pancasila perlu diperkuat agar masyarakat memahami demokrasi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Dalam bidang pendidikan, Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan nasionalis. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dapat memperkuat kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan semangat kebangsaan (Hendrastomo, 2025). Upaya ini harus dilakukan melalui kurikulum yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pengalaman hidup siswa (Rusmulyani, 2024). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi materi pelajaran, tetapi menjadi nilai hidup yang membentuk perilaku dan kepribadian peserta didik di dunia nyata.

Pancasila adalah hasil kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang lahir dari perjalanan sejarah panjang mulai dari masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga era reformasi dan globalisasi. Ia bukan sekadar dokumen historis, melainkan cermin dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila memiliki makna strategis bagi pembentukan karakter bangsa yang berkeadilan, bermartabat, dan berkepribadian (Sofyan & Sanusi, 2023). Di tengah derasnya arus globalisasi, bangsa Indonesia harus mampu menempatkan Pancasila sebagai pedoman moral dan ideologis yang hidup, agar cita-cita nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai sebuah

bangsa memiliki sejarah panjang yang terbentuk melalui dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Perjalanan menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional tidak hanya ditandai oleh perjuangan fisik melawan penjajahan, tetapi juga oleh pergulatan pemikiran dalam menemukan dasar negara yang mampu mempersatukan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Dalam konteks inilah, Pancasila lahir sebagai konsensus nasional yang merepresentasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ia menjadi fondasi ideologis yang menuntun arah pembangunan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Namun, di tengah perubahan global yang begitu cepat, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius. Arus globalisasi, kemajuan teknologi digital, serta pengaruh budaya luar telah menggeser orientasi moral dan sosial masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap memudarnya nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan toleransi yang menjadi ciri khas Indonesia. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi keharusan agar ideologi ini tidak hanya dipahami sebagai simbol formal negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang relevan dengan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena lebih menekankan pada makna dan pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa daripada pada angka atau data statistik. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan makna yang muncul dari pengalaman dan konteks kehidupan sosial.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini menggambarkan suatu keadaan secara apa adanya berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Kajian ini menelusuri penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, masa Reformasi, hingga masa globalisasi dan digital saat ini (Sugiyono, 2022). Dengan cara ini, peneliti dapat melihat perkembangan serta keberlanjutan nilai-nilai Pancasila sepanjang sejarah perjuangan bangsa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dosen pendidikan Pancasila, sejarawan, dan praktisi kewarganegaraan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen sejarah, arsip BPUPKI dan PPKI, serta peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu studi pustaka, , dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber tertulis tentang nilai-nilai Pancasila. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh pandangan para ahli mengenai peran dan penerapan nilai Pancasila pada berbagai masa. Sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip, pidato tokoh bangsa, dan dokumen penting lain yang mendukung penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang dianggap penting. Pada tahap penyajian data, hasil temuan disusun berdasarkan periode sejarah dan nilai-nilai Pancasila yang muncul di setiap masa. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menemukan makna dan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, data dari studi pustaka, dan hasil dokumentasi untuk memastikan data yang diperoleh benar, akurat, dan dapat dipercaya. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Akar Nilai Pancasila dalam Sejarah Pra Kemerdekaan

- a. Sumber historis: Nilai-nilai yang sekarang dirangkum dalam Pancasila sudah berakar jauh dalam adat, budaya, dan praktika keagamaan masyarakat Nusantara: keyakinan pada kekuatan supranatural, ritual keagamaan, norma moral yang dianggap berasal dari Yang Maha Kuasa, serta bentuk-bentuk kehidupan komunal yang menekankan gotong-royong dan tata susila. Dari akar budaya inilah para perumus bangsa pada 1945 menafsirkan, merumuskan, dan menyepakati rumusan dasar negara yang akhirnya dikenal sebagai Pancasila. (Sumber ringkas: Piagam Jakarta dan kajian sejarah BPUPKI/PPKI).
- b. Pancasila dalam Lintasan Sejarah Bangsa Indonesia
 1. Era Pra-Kemerdekaan : Sebelum proklamasi ada perdebatan panjang tentang dasar

negara yang cocok untuk Indonesia yang majemuk. Dalam sidang BPUPKI (Mei–Juli 1945) muncul banyak gagasan Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengemukakan dengan versi-versi rumusan dasar.

pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan (Panitia 9) merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta; di situ rumusan sila pertama masih berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dan empat sila lainnya seperti sekarang pada dasarnya sudah tercantum. Piagam ini adalah hasil kompromi politik antara aspirasi umat Islam dan aspirasi nasional yang plural.

Tokoh penting:

- Ir. Soekarno memperkenalkan dan menjelaskan gagasan Pancasila di sidang BPUPKI (1 Juni 1945); menjadi tokoh sentral perumusan ideologi nasional.
- Mohammad Hatta peran besar pada tahap finalisasi; aktif berunding demi persatuan.
- Panitia Sembilan (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H., Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Raden Abikusno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, Mr. Alexander Andries Maramis) menyusun rumusan awal yang menjadi dasar proklamasi.

2. Penerapan nilai Pancasila di tengah dampak globalisasi

Pancasila harus diaktualisasikan melalui kesadaran subjektif setiap warga negara. Kesadaran ini mencakup tanggung jawab pribadi untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lickona, pengembangan karakter yang baik mencakup tiga dimensi moral, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral, yang menjadi dasar pembentukan pribadi berkarakter Pancasila.

Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang berbagai elemen bangsa, hingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Namun, sejak era reformasi, peran Pancasila mulai melemah akibat krisis multidimensi dan perubahan sosial yang cepat. Dampaknya terlihat dari menurunnya moralitas generasi muda, seperti perilaku menyimpang, rendahnya etika sosial, serta meningkatnya pengangguran dan praktik politik tidak sehat.

Pancasila memiliki fungsi strategis sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menegaskan pentingnya persatuan dan loyalitas terhadap bangsa. Dalam konteks kepemudaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menekankan penguatan nilai patriotisme, profesionalitas, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa.

Untuk mengukur ketahanan ideologi bangsa, digunakan Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP) yang berfungsi mendeteksi potensi pelemahan nilai Pancasila akibat pengaruh globalisasi. Tantangan ideologi ini meliputi penetrasi paham komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Upaya penguatan ideologi dilakukan melalui pendidikan dan kegiatan pembinaan seperti Training Kader Bangsa yang bertujuan menumbuhkan komitmen generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Penguatan wawasan kebangsaan menjadi hal penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran moral dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dipelajari, tetapi juga diamalkan dalam tindakan.

Nilai Nilai Pancasila Dalam Kerajaan Kerajaan Nusantara

1. Kerajaan Kutai

Menurut Ida Sugiarti dkk. dalam Modul Pendidikan Pancasila (2020, hlm. 28), Kerajaan Kutai di masa pemerintahan Raja Mulawarman menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu tradisi yang menunjukkan hal tersebut adalah pelaksanaan “Kenduri”, yaitu pemberian sedekah kepada para Brahmana. Sebagai bentuk balasan, para Brahmana memberikan persembahan berupa “Prasasti Yupa” kepada raja.

Beberapa nilai Pancasila yang terlihat pada Kerajaan Kutai antara lain:

- a) Ketuhanan: Rakyat memeluk agama Hindu dan melaksanakan ritual keagamaan.
- b) Kerakyatan: Rakyat hidup makmur dan terjamin kesejahteraannya.
- c) Persatuan: Wilayah kerajaan mencakup seluruh Kalimantan Timur,

menunjukkan integrasi dan kesatuan wilayah.

2. Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya pada puncak kejayaannya menguasai wilayah yang meliputi Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Semenanjung Malaka, dan daerah sekitarnya. Meskipun wilayahnya luas, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang tertata rapi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi, misalnya, kerajaan ini menyatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai kerajaan sehingga kegiatan perdagangan berjalan efisien dan tertib.

Nilai-nilai Pancasila yang terlihat di Sriwijaya antara lain:

- Ketuhanan: Menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara.
- Kemanusiaan: Bersikap terbuka terhadap pendatang tanpa membedakan asal-usul.
- Persatuan: Menyatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai kerajaan demi kelancaran kehidupan sosial.
- Kerakyatan: Kehidupan rakyat sejahtera dan aman.
- Keadilan: Rakyat hidup berdampingan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang.

3. Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara dengan wilayah kekuasaan yang meliputi hampir seluruh pantai Nusantara, sebagian Vietnam Selatan, hingga Barat Papua. Majapahit juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat Majapahit hidup rukun meski memeluk agama yang berbeda, yakni Hindu dan Buddha, menunjukkan persatuan di tengah keragaman. Selain itu, hubungan diplomatik Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Tiongkok, Kamboja, dan Champa memperlihatkan nilai kemanusiaan dan kerjasama.

Nilai-nilai Pancasila yang tampak di Majapahit antara lain:

- Ketuhanan: Keberagaman agama dijalankan dengan rukun dan harmonis.
- Kemanusiaan: Hubungan baik dijaga dengan kerajaan lain melalui diplomasi dan kerjasama.

- Persatuan: Rakyat dan pejabat kerajaan bekerja sama, meski berbeda agama, demi stabilitas kerajaan.
- Kerakyatan: Pemerintahan dijalankan melalui musyawarah, dengan profesi tertentu yang berperan memberi arahan bagi masyarakat.

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila lahir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menentukan dasar negara yang merdeka. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak diadopsi dari bangsa lain, melainkan bersumber dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri yang menjunjung tinggi semangat gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial. Ketika para pendiri bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI dan PPKI, mereka berupaya menggali nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan dasar negara Indonesia yang berdaulat (Ismail, 2019).

Menurut penelitian dalam Jurnal USM Law Review, Pancasila berperan sebagai landasan dalam pembentukan negara hukum Indonesia. Hal ini berarti setiap tindakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bermuatan moral dan keadilan yang sejalan dengan karakter bangsa (Sari, 2024).

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap peraturan, kebijakan, dan keputusan pemerintah wajib berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai “Negara Hukum Pancasila”, yakni sistem hukum yang tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga mengutamakan nilai kemanusiaan dan kebersamaan (Maswati & Hanafie, 2022).

Selain itu, sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bersama seluruh rakyat Indonesia. Ideologi ini bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Agar tidak hanya menjadi konsep teoritis, nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tindakan nyata sehari-hari (Saingo, 2025).

Nilai-nilai utama yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar kehidupan bernegara, meliputi: Ketuhanan, yaitu penghormatan terhadap kebebasan beragama. Kemanusiaan, yaitu penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Persatuan, yaitu semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga keutuhan bangsa. Kerakyatan, yaitu pengambilan

keputusan melalui musyawarah untuk kepentingan bersama. Keadilan Sosial, yaitu kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok (Mulyadi et al., 2025).

Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata tidak selalu mudah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh keragaman masyarakat Indonesia serta perbedaan sistem hukum adat, agama, dan nasional yang kadang menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan, terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Maswati & Hanafie, 2022).

Selain itu, arus globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut agar penerapan Pancasila terus diperbarui tanpa mengubah substansinya. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, bukan hanya pada tataran teori di sekolah (Sari, 2024).

Dalam lintasan sejarah, implementasi Pancasila mengalami dinamika di setiap periode pemerintahan. Pada masa Orde Lama, Pancasila dikaitkan dengan semangat revolusi nasional; pada era Orde Baru, dijadikan legitimasi kekuasaan; sedangkan di masa Reformasi, Pancasila kembali dimaknai sebagai pedoman moral kehidupan berbangsa dan bernegara (Ismail, 2019). Saat ini, di era globalisasi dan perkembangan digital, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan baru berupa pengaruh ideologi lintas negara yang dapat menggeser cara pandang generasi muda (Mulyadi et al., 2025).

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya merupakan hasil dari perjuangan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi pondasi moral dan ideologis yang tetap relevan hingga kini. Selama nilai-nilai Pancasila dijalankan dalam bidang sosial, hukum, dan politik, Pancasila akan terus menjadi identitas nasional dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan, keadilan, serta kemanusiaan (Saingo, 2025).

Dinamika Pancasila dari Masa ke Masa :

1. Sebagai ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa, dinamika Pancasila penting untuk dikaji dan diketahui bersama. Untuk itu penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana dinamika pancasila dari masa ke masa, dengan harapan berbagai peristiwa yang telah terjadi mampu dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi bersama. Penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif dengan metode studi pustaka melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sejak awal dirumuskan hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila telah mengalami berbagai tantangan, hambatan, dan ancaman dalam mempertahankan maupun pengamalan nilai-nilai nya. Di era orde lama dan orde baru Pancasila masih digunakan sebagai alat kekuasaan sehingga dalam implementasinya, berbagai kebijakan pemerintah banyak yang ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

(Notonagoro. (1983). Pancasila: Dasar Falsafah Negara Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.)

2. Masa orde baru yang berarti juga bicara soal Islam di Indonesia, starting discoursnya berawal dari perdebatan tentang asas bernegara dalam sidang (BPUPKI). Satu pihak yang diwakili oleh kalangan Islamis menginginkan diberlakukannya asas Islam sebagai asas tunggal Negara. Keinginan ini dipandang cukup beralasan karena perjuangan umat Islam menjadi bagian kekuatan terbesar dan terpenting dalam mengusir penjajah. Dilain pihak kalangan nasionalis dengan argumen bahwa kalangan non Islam juga ikut andil dalam mengantarkan Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaannya, mengusulkan asas tunggal Pancasila guna mengakomodir kalangan non Muslim dan keragaman budaya bangsa.

(Soekarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.)

3. Pada Perang Dunia II tahun 1942, bangsa Indonesia belum punya negara. Indonesia saat itu masih dijajah Jepang. Dalam penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita. Hasil panen diambil paksa. Para pemuda dijadikan romusha, pekerja paksa yang terus disiksa. Gadis-gadis diculik, dijadikan jugun ianfu atau wanita penghibutentara Jepang. Maka pasukan Pembela Tanah Air (PETA) di bawah pimpinan Supriyadi pun memberontak terhadap Jepang. Para tokoh nasional juga makin gigih berusaha agar Indonesia segera merdeka. Usaha itu tidak sia-sia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan usaha tersebut. Kesempatan Indonesia untuk merdeka menjadi terbuka karena kekuatan Jepang sebagai penjajah mulai lemah. Jepang saat itu tengah perang melawan pasukan Sekutu dalam Perang Dunia II. Tentara Sekutu adalah gabungan tentara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain. Tahun 1944 akhir, posisi tentara Jepang mulai

terdesak. Jepang lalu berusaha merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang.

(BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). (2020). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi. Jakarta: BPIP RI.)

Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki sejarah panjang yang terbentuk melalui dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Perjalanan menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional tidak hanya ditandai oleh perjuangan fisik melawan penjajahan, tetapi juga oleh pergulatan pemikiran dalam menemukan dasar negara yang mampu mempersatukan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Dalam konteks inilah, Pancasila lahir sebagai konsensus nasional yang merepresentasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ia menjadi fondasi ideologis yang menuntun arah pembangunan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

(Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.)

Namun, di tengah perubahan global yang begitu cepat, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius. Arus globalisasi, kemajuan teknologi digital, serta pengaruh budaya luar telah menggeser orientasi moral dan sosial masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap memudarnya nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan toleransi yang menjadi ciri khas Indonesia. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi keharusan agar ideologi ini tidak hanya dipahami sebagai simbol formal negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang relevan dengan perkembangan zaman. (Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.)

Relevansi Nilai Pancasila di Era Globalisasi

Nilai-nilai Pancasila memiliki makna yang sangat penting di era globalisasi karena berfungsi sebagai pedoman moral, etika, dan ideologi bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat dan kompleks. Arus globalisasi memang membawa berbagai kemajuan seperti kemudahan informasi, kemajuan teknologi, dan keterbukaan antarnegara. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan baru seperti krisis moral, menurunnya rasa nasionalisme, serta meningkatnya pengaruh budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur bangsa. Dalam situasi seperti ini, Pancasila hadir sebagai dasar yang menuntun bangsa Indonesia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa

kehilangan identitas nasionalnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman hidup untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dunia modern dengan kepribadian bangsa yang berakar pada nilai kemanusiaan dan kebersamaan (Wiyono, Hindaawati, & Ramadhan, 2024).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki peranan penting untuk menjaga keseimbangan spiritual di tengah arus globalisasi yang sering menonjolkan gaya hidup materialistik dan individualistik. Nilai Ketuhanan mengingatkan bahwa sebesar apa pun kemajuan yang dicapai, manusia tetap membutuhkan pedoman moral dan keimanan sebagai dasar kehidupan. Globalisasi sering kali membawa pengaruh sekuler yang dapat menjauhkan manusia dari nilai religius, sehingga sila ini menjadi pengingat agar bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai spiritualitas dan toleransi antarumat beragama. Dengan menerapkan nilai Ketuhanan, masyarakat Indonesia dapat hidup damai dalam keberagaman tanpa terpengaruh oleh konflik identitas atau intoleransi yang kerap muncul di dunia global (Saingo, 2025).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga sangat relevan di tengah dunia global yang cenderung kompetitif dan sering menimbulkan ketimpangan sosial. Nilai kemanusiaan mengajarkan agar setiap manusia diperlakukan dengan adil dan bermartabat tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Dalam konteks globalisasi, sila ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang semakin individualistik. Penerapan nilai kemanusiaan juga menjadi dasar agar kemajuan ekonomi global tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Yuniarto, Lestari, & Saputra, 2025).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berperan besar dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah ancaman disintegrasi yang dapat timbul akibat terbukanya pengaruh budaya dan ideologi asing. Globalisasi membuka peluang besar untuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi juga membawa risiko terpecahnya rasa kebangsaan. Oleh karena itu, nilai persatuan menegaskan pentingnya menjaga kesatuan bangsa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan semangat persatuan, bangsa Indonesia dapat tetap kokoh menghadapi arus global sambil memanfaatkan keragaman sebagai kekuatan untuk memperkuat identitas nasional. Persatuan juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi karakter khas bangsa di tengah dunia yang semakin individualistik (Wiyono et al.,

2024).

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan perlunya demokrasi yang berdasarkan nilai moral dan kebijaksanaan. Di era globalisasi, banyak negara mengadopsi sistem demokrasi liberal yang cenderung menonjolkan kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Namun, demokrasi menurut Pancasila berbeda karena menempatkan musyawarah dan kebersamaan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Nilai ini mengajarkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan menerapkan prinsip kerakyatan yang berlandaskan hikmat dan kebijaksanaan, Indonesia dapat mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya sendiri, bukan sekadar meniru sistem politik luar negeri (Ismail, 2019).

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sangat penting dalam menghadapi dampak ekonomi global yang sering menimbulkan ketimpangan sosial dan kesenjangan kesejahteraan. Globalisasi ekonomi dapat menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan, tetapi jika tidak diatur dengan baik, dapat memperlebar jarak antara yang kaya dan miskin. Nilai keadilan sosial menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata dan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok. Dengan menjadikan keadilan sosial sebagai pedoman, Indonesia dapat memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan nilai solidaritas dan kemanusiaan (Yuniarto et al., 2025).

Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai penyaring budaya di tengah derasnya pengaruh global yang sering membawa nilai-nilai asing. Arus globalisasi memudahkan masuknya budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, seperti gaya hidup konsumtif, individualistik, atau hedonis. Dalam hal ini, Pancasila menjadi pedoman untuk menyaring dan menyeleksi nilai-nilai yang masuk agar hanya hal positif yang diambil, sementara yang bertentangan dengan moral bangsa ditolak. Dengan cara ini, masyarakat Indonesia dapat tetap terbuka terhadap kemajuan global tanpa kehilangan identitas nasionalnya (Wiyono et al., 2024).

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda memiliki karakter yang kuat, berakhlak, dan berjiwa nasionalis. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila akan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual,

tetapi juga memiliki sikap tanggung jawab sosial dan moral yang tinggi. Generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan global untuk membawa perubahan positif bagi bangsa, bukan justru menjadi korban dari pengaruh negatif globalisasi (Saingo, 2025).

Dari sisi pemerintahan, penerapan nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik. Globalisasi sering menuntut negara untuk mengikuti arus ekonomi dan politik dunia, tetapi kebijakan nasional tetap harus berpijak pada kepentingan rakyat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, negara Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan tetap mempertahankan kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya (Ismail, 2019).

Secara keseluruhan, Pancasila tetap relevan bahkan semakin penting di era globalisasi. Nilai-nilainya menjadi kompas moral dan identitas nasional yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Pancasila tidak hanya diwarisi dari masa lalu, tetapi juga harus terus dihidupkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami, mengamalkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, berkarakter, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan di tengah dunia global yang terus berubah (Yuniarto et al., 2025).

KESIMPULAN

Pancasila lahir dari akar sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Nusantara yang telah berkembang sejak zaman kerajaan hingga era kemerdekaan. Nilai-nilainya mencerminkan prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang telah diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat sejak Kerajaan Kutai, Sriwijaya, hingga Majapahit.

Peran tokoh perumus Pancasila, seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan anggota Panitia Sembilan, sangat krusial dalam merumuskan dasar negara yang mampu mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia. Proses ini melibatkan kompromi politik, kesadaran persatuan, dan upaya menyeimbangkan aspirasi kelompok agama dan nasionalis. Seiring perjalanan sejarah, Pancasila mengalami dinamika penerapan dari era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Setiap periode menunjukkan tantangan dan peluang berbeda: mulai dari konsolidasi negara dan legitimasi politik,

penyebaran ideologi top-down, hingga penguatan pendidikan karakter dan partisipasi masyarakat.

Di era globalisasi, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dan ideologi terbuka yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Nilai-nilainya dapat menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya, serta membentuk generasi muda yang berkarakter, beretika, dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar dasar negara secara formal, tetapi juga pedoman hidup bangsa yang harus dihayati, diamalkan, dan dikembangkan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Amalia, A., Asna, F., Fitriani, F., & Mubarak, A. (2024). *Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia pada Era Pra Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan*. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(1).
- Amalia, F. (2023). *Pendidikan karakter berbasis Pancasila*. *Educatus: Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 29–40.
- Dewi, M. S. (2021). *Penerapan Pancasila dari arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia*. *JJPP: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*.
- Djawaria, P., Tandafatu, F. X. U., Mbagha, M. S., Raja, M. O., & Ngaza, W. Y. (2023). *Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tradisi adat Flores, Nusa Tenggara Timur*. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Fauzi, M. (2022). *Pendidikan Pancasila di era digital*. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).
- Hidayat, M. (2022). *Pendidikan moral berbasis nilai Pancasila*. *Jurnal Moralita, Universitas Siliwangi*, 1(2).
- Hidayat, R. (2021). *Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional*.
- Husni, A. (2022). *Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka*. *Academia.edu*.
- Jemamu, V. A., Desrida, G. R., & Wisman Jaya, H. (2024). *Dinamika pergerakan nasional: Peran organisasi pemuda dalam proklamasi Indonesia*. *Generasi Pancasila*.
- Khairi, R., Marito, S., & Ibrahim, N. F. (2025). *Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa*. *Jurnal TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Lestari, P. (2023). *Relevansi Pancasila dalam pembelajaran kewarganegaraan*. *Jurnal Cekatan Edukasi dan Kepemimpinan Indonesia*, 4(1).

Jurnal Inovasi Pembelajaran Progresif

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jipp>

Vol. 6, No. 4, Desember 2025

- Mahfud, C. (2021). *Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara*.
- Nugroho, A. (2023). *Pancasila sebagai dasar negara dan perannya dalam kehidupan berbangsa*. *Jurnal Universitas Law Review*, 3(2).
- Nurhidayah, S. (2022). *Pancasila dan tantangan globalisasi*. *Academia.edu*.
- Prasetyo, B. (2023). *Relevansi nilai Pancasila bagi pembangunan karakter bangsa*. *Populer: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1).
- Pratama, A. (2022). *Pancasila sebagai dasar negara: Telaah teoritis dan aplikatif*. *Advances: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4).
- Rahman, F. (2023). *Pancasila sebagai ideologi terbuka: Konsep dan implementasi*. *Jurnal Civic Virtue*, 5(1).
- Rahayu, L. (2022). *Pancasila sebagai dasar ideologi negara*. *Juridiksiam: Jurnal Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan*, 9(1).
- Rini, W. I. (2024). *Nilai-nilai perjuangan Sarekat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia sebagai penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran sejarah*. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 4(1).
- Santoso, Y. (2023). *Peran Pancasila sebagai ideologi bangsa*. *Edunity: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2).
- Sari, D. (2022). *Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa*. *Pancasila Journal*, 3(1).
- Setiawan, T. (2022). *Pendidikan Pancasila dalam membangun karakter bangsa*. *Jurnal Online Edukasi*, 1(1).
- Setiawan, Z. (2024). *Peran tokoh Nahdlatul Ulama dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia*. *Spektrum*, 18(2).
- Siagian, N., & Ilham. (2025). *Kemerdekaan Indonesia dan nilai religiusitas: Refleksi atas nilai Ketuhanan dalam Pancasila*. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1).
- Siregar, A. (2013). *Pandangan Bung Karno tentang Pancasila dan pendidikan*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, XXXII(1).
- Siregar, H., Rorisa, M., Alfiyah, S., & Usiono, U. (2025). *Pancasila sebagai ideologi nasional*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Susanto, I. (2021). *Pemikiran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia*.

**Jurnal Inovasi Pembelajaran
Progresif**

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jipp>

Vol. 6, No. 4, Desember 2025

- Safitri, L. (2023). *Pancasila sebagai dasar moral dan etika bangsa*. *AR-Rumman: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Wijaya, H. (2023). *Pancasila dalam perspektif hukum dan sosial*. *Jurnal Cekatan Edukasi dan Kepemimpinan Indonesia*, 4(1).
- Wulandari, Y., Zahro', K., & Hidayah, A. (2023). *Kontribusi warisan nilai-nilai kerajaan Islam terhadap pembentukan Pancasila di Nusantara*. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*.
- Yulianto, R. (2023). *Pancasila sebagai panduan moral bangsa Indonesia*. *Jurnal Edukasi*, 2(2), 138–152.
- R. Fajar, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
(Original work published 2012).